



Judul : NasDem tolak Perppu percepatan Pilkada
Tanggal : Selasa, 21 Nopember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

NasDem Tolak Perppu Percepatan Pilkada

PEMERINTAH berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mempercepat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pelaksanaan pilkada seharusnya November 2024, tetapi akan dipercepat menjadi September 2024.

Fraksi Partai NasDem menolak keras wacana mempercepat jadwal dan tahapan Pilkada 2024 dengan melakukan revisi Undang-Undang Pilkada ataupun Perppu Pilkada. "Fraksi NasDem menolak perppu percepatan Pilkada 2024," tegas anggota Fraksi NasDem Muhammad Farhan dalam keterangan tertulisnya,

kemarin.

Menurut Farhan, hingga saat ini tidak ada faktor penting dan alasan yang mendesak untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Yang ada, keinginan pemerintah untuk mempercepat jadwal Pilkada 2024 terlihat terburu-buru dan tidak ada transparansi.

"Pergeseran dari November menjadi September menimbulkan tanda tanya. Kenapa mesti September? Jangan-jangan ada agenda tertentu yang diincar pihak-pihak yang ingin mengamankan hasil pilkada sebelum rakyat memilih," ungkap Farhan.

Tak hanya itu, percepatan jadwal pilkada akan menim-

bulkan adanya pergeseran pengambilan sumpah anggota DPRD terpilih di Februari yang seharusnya Agustus, digeser ke November sehingga akan terjadi kekosongan fungsi DPRD kota, kabupaten, dan provinsi seluruh Indonesia selama empat bulan.

Selama empat bulan ini, kata Farhan, menurut revisi Undang-Undang Pilkada tersebut, untuk tingkat provinsi, fungsi DPRD akan diambil alih menteri dan fungsi DPRD kota dan kabupaten akan diambil alih Pj gubernur.

Akhirnya, praktik tata negara dalam kerangka otonomi daerah itu tidak ada lagi yang namanya *trias politica* karena

fungsi legislatif diambil alih eksekutif. "Ini masalah besar sebetulnya, maka, harus dibiarkan antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan Komisi II."

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Pemerintah tengah menyusun payung hukum dalam percepatan pilkada.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Rabu (20/9), mengartakan rencana percepatan Pilkada 2024 ini akan diwujudkan pemerintah dengan menerbitkan Perppu Pilkada. (Fah/P-2)